



**PENGARUH PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA DI DESA  
KALIWINING OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER  
TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN ANGGOTA  
KARANG TARUNA DESA KALIWINING**

*(The Effect of Neighbourhood Youth Association of Kaliwining Village by Social  
Departement of Jember Regency Toward Youth's Members Prosperity Degree of  
Kaliwining Village)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

**Oleh**

**DEKKI UMAMUR RAIS**

**030910201221**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2010**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya sederhana dan ringkas ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Syamsul Arifin dan Bunda Maiyah Baidlawi yang telah melimpahkan kasih sayang dan doa, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan hidayah-Nya.
2. Keluarga Besarku Alm. H. Baidlawi, Hj. Salha Baidlawi, Hatimah Baidlawi, H. Hadili, S.Ag, paman-pamanku tercinta Hanafi, Hasan, Saleh dan Samhari.
3. Semua Guruku dari SD sampai PT yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh kesabaran.
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

## MOTO

“ Akal Manusia Tidak Pernah Terbatas, Selama Manusia Masih Mau Berfikir Dan Bertanya ” (Akhmad Wahib)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> .hal. 12. **Pergulatan Pemikiran Islam**. Jakarta. LP3IS

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dekki Umamur Rais

NIM : 030910201221

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Pemberdayaan Karang Taruna Di Desa Kaliwining Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anggota Karang Taruna Desa Kaliwining (*The Effect of Neighbourhood Youth Association of Kaliwining Village by Social Departement of Jember Regency Toward Youth’s Members Prosperity Degree of Kaliwining Village*)”. adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Juli 2010

Yang menyatakan,

Dekki Umamur Rais

NIM : 03091201221

**SKRIPSI**

**PENGARUH PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA DI DESA  
KALIWINING OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER  
TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN ANGGOTA  
KARANG TARUNA DESA KALIWINING**

*(The Effect of Neighbourhood Youth Association of Kaliwining Village by Social  
Departement of Jember Regency Toward Youth's Members Prosperity Degree of  
Kaliwining Village)*

**oleh**

**DEKKI UMAMUR RAIS**

**030910201221**

**DOSEN PEMBIMBING I : Dra. INTI WASIATI, MM  
NIP.195307311980022001**

**DOSEN PEMBIMBING II : Drs. AGUS SUHARSONO, MSi  
NIP. 196308141989031023**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemberdayaan Karang Taruna Di Desa Kaliwining Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anggota Karang Taruna Desa Kaliwining (*The Effect of Neighbourhood Youth Association of Kaliwining Village by Social Departement of Jember Regency Toward Youth’s Members Prosperity Degree of Kaliwining Village*)”, telah disetujui dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada

Hari : Selasa

Tanggal : 05 Oktober 2010

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

### Tim penguji

Ketua : Drs. Anwar, M.Si (.....)

Sekretaris : Dra. Inti Wasiati, M.M (.....)

Anggota : Drs. Agus Suharsono, M.Si (.....)

Selfi Budi H. S.Sos, M.Si (.....)

Rachmat Hidayat, S.Sos, M.Si (.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

NIP. 195207271981031003

## RINGKASAN

**Pengaruh Pemberdayaan Karang Taruna Di Desa Kaliwining Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anggota Karang Taruna Desa Kaliwining;** Dekki Umamur Rais; 030910201221; 2010; 67 halaman; Program Studi Administrasi Negara Universitas Jember.

Pembangunan di Inonesia merupakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, dimana tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan Nasional mencakup upaya peningkatan semua segi kehidupan bangsa, dapat berupa pembangunan aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, dan dapat pula berupa pembangunan ideologi.

Rumusan di atas menggambarkan pembangunan kesejahteraan Sosial sebagai suatu keadaan dimana digambarkan secara ideal adalah suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan.

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun, diakui memang belum dapat menanggulangi jumlah pengangguran yang cukup besar dan masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Gerakan Pemberdayaan masyarakat menjadi mutlak untuk dilakukan, agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan disegala sektor berkembang secara dinamis dan efektif. Karena maju mundurnya sebuah negara salah satunya diukur oleh sejauh mana tingkat partisipasi masyarakatnya dalam memberikan sumbangsuhnya atas segala problematika yang dihadapi bangsanya. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, akan semakin maju peradaban bangsa tersebut. Untuk

meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan pemberdayaan sosial.

Dalam struktur pemerintahan departemen yang bertanggung jawab terhadap pemberdayaan usaha kesejahteraan sosial adalah Departemen Sosial. Bentuk program dari pemberdayaan tersebut adalah memanfaatkan PSKS seperti Karang Taruna. Dinas Sosial (DINSOS) sebagai bagian dari Departemen Sosial yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program PSKS Departemen Sosial, demikian juga Dinas Sosial Kabupaten Jember. Kemitraan yang dijalin antara Dinas Sosial dengan Karang Taruna adalah berbentuk pemberdayaan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan untuk mencapai kemandirian yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan anggotanya.

Dengan memberikan pemberdayaan Karang Taruna diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota karang taruna yang diberdayakannya.

Dari hasil penelitian ini saya menemukan ada pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Pemberdayaan Karang Taruna Di Desa Kaliwining Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anggota Karang Taruna Desa Kaliwining. Dengan demikian Hipotesis Nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara pemberdayaan Karang Taruna dengan tingkat kesejahteraan anggota karang taruna ditolak dan Hipotesis Kerja ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara Pemberdayaan Karang Taruna dengan Tingkat Kesejahteraan Anggota Karang Taruna diterima.

Kata Kunci : Pemberdayaan Karang Taruna, Tingkat Kesejahteraan

## **PRAKATA**

Alhamdulillah...puji syukur atas segala Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya penulis masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan tugas ini. Dengan segala Kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Pemberdayaan Karang Taruna Di Desa Kaliwining Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anggota Karang Taruna Desa Kaliwining”

Penyusunan karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa dalam karya ini melibatkan banyak pihak yang memberikan dukungan moral, materil dan spritual. Oleh karena itu, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak, Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Suhartono, M.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Ibu Dra. Inti Wasiati, MM, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1 sekaligus Dosen Wali, serta Bapak Drs. Agus Suharsono, M.Si selaku Dosen Pembimbing 2.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak Kahfi, Bapak Hannan, dan Mas Agus, selaku pembinna Karang Taruna dinas Sosial Kabupaten Jember.

6. Bapak H. Lutfi, Kepala Desa Kaliwining, Mas Bambang Hariyono, Mas Musta'in, dan Mas Yoyok Ali Sunarto serta Seluruh Pengurus dan warga Karang Taruna Tunas Bangsa Desa Kaliwining.
7. Keluarga Besar HMI Cabang Jember Komisariat Fisipol...Yakin Usaha Sampai...
8. Kawan-Kawan LMND Eksekutif Jember...Jangan Diam, melawan atau mati tertindas...!!!
9. Teman-teman MPA. Mapalus Fisip Universitas Jember...Satu Tekad Satu Tujuan....
10. Sariyadi, Helmi, Arista, Nanang dan Seluruh warga AN '03 semoga kebersamaan kita selalu menjadi kenangan terindah yang takkan pernah terlupakan.
11. Mas Rio Rolis, Deny Ardyansyah, Asmuni, Dwi Prio Atmojo, Ja'far Shodiq, Dwi Prio Utomo...sakalangkong, banyak hal yang saya pelajari dari anda-anda semua.
12. Saudaraku di rumah hijau...Yusuf Rio W.P., Jhoni Eka Putra, Muhlisin, Novianto, Reliyadi, Farijah, Sariyadi, Dina, Arif, Atin, Lilik Ishaq, Arimbo, Angga, Enjang, Qomar, Wahyu, Ita, Yusuf, Jamal, Fahim, Deasy, Nilam.....persaudaraan itu tak kan pernah tergadaikan oleh apapun.
13. Ridwan james, Bang Sat Ori, Taufix, Rangga, Jaka, Ratna...memilih jalan berbeda itu bukan kesalahan, tapi kita membuka jalan hidup kita dimasa depan...
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih dan penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran penulis butuhkan agar menjadi lebih baik lagi di kemudian hari.

Jember, 5 Juli 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Perumusan Masalah</b> .....	19
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	20
<b>1.4 Manfaat penelitian</b> .....	20
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Landasan teori dan Konsep</b> .....	21
<b>2.2 Konsep Pemberdayaan Karang Taruna</b> .....	27
<b>2.3 Konsep Kesjahteraan Anggota Karang Taruna</b> .....	31
<b>2.4 Hipotesis</b> .....	33
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b>	
<b>3.1 Metode Pendekatan</b> .....	35
<b>3.2 Penentuan lokasi Penelitian</b> .....	36
<b>3.3 Desain Penelitian</b> .....	36
<b>3.4 Penentuan Populasi</b> .....	37

3.5 Penentuan Sampel.....	37
3.6 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.7 Definisi Operasional .....	39
3.8 Metode Pengumpulan Data .....	41
3.9 Metode Analisis Data .....	43
<b>BAB 4. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN</b>	
4.1 Pengantar.....	46
4.2 Sejarah Singkat Karang Taruna Tunas Bangsa Desa Kalwining	47
4.3 Visi, dan Misi Karang Taruna Tunas Bangsa.....	48
4.3.1 Visi .....	48
4.3.2 Misi .....	48
4.4 Susunan Personalia dan Keanggotaan Karang Taruna Tunas Bangsa .....	49
4.5 Barang Iventaris Usaha Organisasi.....	50
4.6 Penyajian Data .....	50
<b>BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Pengantar .....	60
5.2 Penerapan Analisis Chi Square (X <sup>2</sup> ).....	60
5.3 Menentukan Frekuensi Observasi Pada Tabel Kontingensi.....	61
5.4 Menentukan Frekuensi fh Untuk Masing-masing Sel.....	62
5.5 Memasukkan Frekuensi Harapan ke dalam Tabel Persiapan.....	63
5.6 Menentukan db Untuk Mencari Taraf Signifikansi.....	44
5.7 Menghitung Nilai Chi Square (X <sup>2</sup> ).....	64
5.8 Menentukan Signifikansi X <sup>2</sup> Hitung dengan Acuan Tabel Harga Kritis Chi Kuadrat.....	65
<b>BAB 6. KESIMPULAN</b>	
Kesimpulan .....	67

## LAMPIRAN

### DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1: Kegiatan Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Karang Taruna Tunas Bangsa Desa Kaliwining.....	15
Tabel 1.2: Bantuan Alat-alat Produksi Pembuatan Sepatu dan sandal.....	16
Tabel 1.3 :Perkembangan Usaha sepatu, Jumlah Pekerja, dan Pendapatan Anggota.....	17
Tabel 4.1 : Data berdasarkan skor jawaban terhadap indikator Peran Fasilitatif .....	52
Tabel 4.2 : Frekuensi kategori jawaban responden terhadap indikator peran Edukasional.....	52
Tabel 4.3 : Data total skor jawaban Responden terhadap Variabel Pemberdayaan Karang Taruna (X).....	55
Tabel 4.4 : Data Frekuensi kategori jawaban responden terhadap Variabel Pemberdayaan Karang Taruna.....	56
Tabel 4.5 : Data skor responden terhadap Variabel Tingkat Kesejahteraan (Y).....	57
Tabel 4.6 : Data Frekuensi Kategori Jawaban responden terhadap variabel Kesejahteraan (Y).....	58
Tabel 4.7 : Kategori Jawaban Responden Terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan.....	59
Tabel 5.1 : Tabel Kontingensi Observasi Variabel X dan Variabel Y.....	62
Tabel 5.2 : Tabel Kontingensi Observasi Frekuensi Harapan.....	57

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Daftar Kuesioner
- B. Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- C. Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Jember
- D. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Karang Taruna Tunas Bangsa Kaliwining

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, dimana tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan Nasional mencakup upaya peningkatan semua segi kehidupan bangsa, dapat berupa pembangunan aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, dan dapat pula berupa pembangunan ideologi.

Menurut Husodo dalam Isbandi (2006:3), pembukaan UUD 1945 menunjukkan niat dan tujuan membentuk negara kesejahteraan yang berbunyi “...Pemerintah Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Juga tercermin dalam pasal 27 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pasal 31 yang menjamin hak tiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 33 dengan tegas mengamanatkan pengelolaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial sosial yang bersifat nasional.

Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan dan muara dari agenda pembangunan ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan pasal mengenai ke-ekonomian berada pada bab XIV UUD 1945 yang berjudul “kesejahteraan sosial”. Menurut Sri-Edi Swasono (dalam Edi Suharto :2005), “Dengan menempatkan pasal 33 dalam UUD 1945 di bawah judul Bab “Kesejahteraan Sosial” itu, berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial

merupakan tes untuk keberhasilan pembangunan, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi apalagi kemegahan pembangunan fisik.” Dengan demikian, dilihat dari perspektif pembangunan sosial, Indonesia menganut negara kesejahteraan, meskipun dengan model residual atau bahkan model minimal. Indonesia menganut sistem keadilan sosial (sila kelima Pancasila) dan secara eksplisit konstitusinya (pasal 27 dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan sosial.

Undang-undang dasar 1945 khususnya pasal 33 secara yuridis formal merupakan landasan konstitusional yang memuat dokumen paling otentik tentang dasar-dasar kebijakan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial di Indonesia. Berdasarkan konstitusi tersebut tampak jelas bahwa, tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat – dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidupnya.

Dalam rumusan Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, pasal 2 ayat 1:

”Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan social yang sbaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Rumusan di atas menggambarkan pembangunan kesejahteraan Sosial sebagai suatu keadaan dimana digambarkan secara ideal adalah suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Kesejahteraan Sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya di ukur secara

ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual.

Mengkaji beberapa pasal yang ada dalam undang-undang tersebut, sejatinya Indonesia adalah Negara yang menganut faham “Negara Kesejahteraan” dengan model “Negara Kesejahteraan Partisipatif”. Dimana model ini menekankan bahwa Negara harus tetap ambil bagaian dalam penanganan masalah sosial, meskipun dalam operasionalnya tetap melibatkan masyarakat.

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun, diakui memang belum dapat menanggulangi jumlah pengangguran yang cukup besar dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a. Kurang koordinasi terutama dalam penetapan kelompok sasaran, jumlah dan lokasinya, serta jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. Sistem penyaluran dana belum menyentuh langsung kepada masyarakat lapisan bawah.
- c. Penetapan upah kerja di beberapa daerah relatif cukup tinggi, sehingga banyak pekerja yang beralih dari posisi sebelumnya.
- d. Mekanisme pengendalian dan pelaporan yang kurang berjalan secara baik.
- e. Penyebaran informasi kepada masyarakat masih sangat rendah
- f. Kurang transparan dalam pengelolaan program/proyek.

Dari beberapa hal yang telah disebutkan tersebut, kita dapat membaca betapa rendahnya tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Gerakan Pemberdayaan masyarakat menjadi mutlak untuk dilakukan, agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan disegala sector berkembang secara dinamis dan efektif. Karena maju mundurnya sebuah negara salah satunya diukur oleh sejauh mana tingkat partisipasi masyarakatnya dalam memberikan sumbangsihnya atas segala problematika yang dihadapi bangsanya. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, akan semakin maju perdaban bangsa tersebut.

Menurut Sumodiningrat dalam Pairan (2006:81) mengungkapkan, agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan berkelanjutan. Maka, dalam pelaksanaannya harus menggunakan pendekatan pembangunan yang partisipatif, yaitu menekankan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama dalam melaksanakan sebuah program pembangunan. Masyarakat lokal perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan sendiri rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan serta melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

Dari gambaran tersebut sejatinya negara kesejahteraan adalah bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok lemah seperti orang miskin, dan penganggur agar terhindar dari gilasan mesin kapitalisme. Beberapa alasan mengapa negara diperlukan dalam mengatur dan melaksanakan pembangunan sosial. *Pertama*, pembangunan sosial merupakan salah satu piranti keadilan sosial yang kongkret, terencana dan terarah, serta manifestasi pembelaan terhadap kelas bawah. Tidak semua warga negara memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dalam memenuhi hajat hidupnya. Negara wajib melindungi dan menjamin kelompok-kelompok rentan yang tercecer dalam balapan bangunan. *Kedua*, semakin mudarnya solidaritas sosial dan ikatan kekeluargaan pada masyarakat modern membuat membuat pelayanan sosial yang tadinya mampu disediakan lembaga keluarga dan keagamaan semakin melemah. *Ketiga*, negara perlu memberikan pelayanan sosial (social service) kepada warganya sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat yang memilihnya. *Keempat*, manusia cenderung berpandangan “myopic” (pendek) sehingga kurang tertarik mengikuti program-program sosial jangka panjang. Negara bersifat paternalistik (pelindung) yang mampu memberikan jaminan sosial secara luas dan merata guna menghadapi resiko-resiko masa depan yang tidak tentu, seperti sakit, kematian, pensiun, bencana alam dan sebagainya.

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu :

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Midgley (dalam Isbandi : 2001) mendefinisikan pembangunan sosial sebagai : *“a process of planned social change designed to promote the well-being of the population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development”* (suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi). Sedangkan bila dilihat dari strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, Midgley mengemukakan ada tiga (3) strategi besar, yaitu :

1. Pembangunan Sosial melalui individu, di mana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat.
2. Pembangunan Sosial melalui komunitas, dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya.
3. Pembangunan Sosial melalui pemerintah, dimana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah.

Menurut Suharto : “Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah, dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial”. Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan.
2. Peningkatan pemberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Ciri utama Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerimaan pelayanan sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas, yang tidak terlepas dari lingkungan sosio kulturalnya. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan kelas sosial. Namun, prioritas utama PKS adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan. Sasaran PKS yang dikenal dengan nama Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain meliputi orang miskin, penyandang cacat, anak jalanan, komunitas adat terpencil (KAT), serta kelompok-kelompok lain yang mengalami masalah sosial, disfungsi sosial atau ketunaan sosial.

Apabila fungsi pembangunan nasioal disederhanakan, maka ia dapat dirumuskan ke dalam tiga tugas utama yang mesti dilakukan negara, yakni pertumbuhan ekonomi, perawatan masyarakat, dan pengembangan manusia. Fungsi

pertumbuhan ekonomi mengacu pada bagaimana melakukan "wirausaha" guna memperoleh pendapatan finansial yang diperlukan guna membiayai kegiatan pembangunan. Fungsi perawatan masyarakat menunjuk pada bagaimana merawat dan melindungi warga negara dari berbagai macam resiko yang mengancam kehidupannya. Sedangkan fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan.

Tiga hal diatas saling berkaitan, pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk menjalankan perawatan dan pengembangan manusia. Namun demikian, fungsi perawatan masyarakat dan pengembangan manusia juga memiliki posisi yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Kedua fungsi tersebut diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berjalan secara berkelanjutan.

Berbagai studi memberi pesan yang sangat jelas bahwa negara yang kuat dan sejahtera adalah negara yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus memiliki komitmen menjalankan pembangunan ekonomi. Laporan tahunan UNDP, *Human Development Report*, yang kini menjadi acuan berbagai negara dunia, secara konsisten menunjukkan bahwa pembangunan sosial mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan sosial tidak akan bertahan lama (tidak berkelanjutan).

Kesejahteraan erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang cukup akut untuk di urai. Masalah kemiskinan telah ada sejak lama sampai sekarang, kemiskinan masih ada, kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan terjadinya krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Ellis (dalam Suharto : 2005) menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat di definisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan

sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini tidak hanya menyangkut aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat di ukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari adalah contoh pengukuran kemiskinan absolut.

”Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo per kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya”. (BPS dan Depsos, 2002:4)

Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Depsos, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Depsos, 2003:3). Yang dimaksud kebutuhan pokok dalam definisi tersebut adalah kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya. Dalam konteks ini Friedman (dalam Suharto : 2005)

mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuasaan sosial yang meliputi :

1. Modal produktif atau asset (tanah, alat produksi, kesehatan).
2. Sumber keuangan (pekerjaan, kredit).
3. organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial).
4. Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa.
5. pengetahuan dan keterampilan.
6. Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

Chambers dalam Pairan (2006:80) menyimpulkan bahwa inti dari masalah kemiskinan terletak pada yang disebut sebagai jebakan kekurangan atau *deprivation trap* yang melilit keluarga miskin, yakni :

- a. Kemiskinan itu sendiri (*poverty*).
- b. Kelemahan fisik (*physical weakness*).
- c. Keterasingan (*isolation*).
- d. Kerentanan (*vulnerability*).
- e. Ketidakberdayaan (*powerlessness*).

Kelima tidak beruntungan ini saling terkait satu sama lainnya dan Chambers menganjurkan agar dua jenis ketidak beruntungan ini untuk mendapatkan prioritas khusus untuk dicarikan solusinya, yakni kerentanan dan ketidakberdayaan. Karena kedua jenis inilah yang sering menjadi penyebab utama kemiskinan.

Menurut Chambers dalam Pairan (2006:80-81), untuk itu dalam penanggulangan kemiskinan pendekatan yang tepat adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat "*people centered, participatory, empowering, and sustainable*". Sehingga pemberdayaan masyarakat berupaya menumbuhkan kembangkan, menstimulus dan memberikan kewenangan masyarakat agar punya daya juang untuk merubah dan menentukan aktifitas dan kreatifitas dalam menuju

kearah yang lebih baik. Sedangkan menurut Jono dalam Pairan (2002:47) ”pembangunan (bertumpu) pada masyarakat” (*community based development*) pada dasarnya dapat dilihat sebagai pendekatan pembangunan melalui pembangkitan kemauan, kemampuan dan kepercayaan pada diri warga komunitas sendiri, agar mereka dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan. Selain itu juga agar mereka dapat bergerak secara metodis, ber-daya guna dan terorganisir.

Dalam struktur pemerintahan di tanah air, lembaga pemerintah yang berperan dominan dalam PKS adalah Departemen Sosial (Depsos), sebagaimana Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, dan Departemen Agama. Keempat departemen diatas berada dibawah koordinasi menteri koordinator kesejahteraan rakyat. Dalam arti sempit, Departemen Sosial sesungguhnya adalah Departemen Kesejahteraan Sosial dengan konsentrasi melaksanakan PKS.

Sebagaimana dijelaskan diatas, negara bukanlah satu-satunya aktor dalam PKS. Masyarakat juga terlibat dalam PKS, baik dalam pelaksanaan berbagai program maupun pendanaannya. Lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan PKS adalah masyarakat, yang biasanya dilaksanakan melalui organisasi-organisasi sosial (orsos) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang UKS dalam skala lokal, nasional, maupun internasional, seperti Karang Taruna.

Dalam salah satu program pemberdayaannya Departemen Sosial Republik Indonesia menggunakan cara dengan menggerakkan dan memanfaatkan seluruh potensi yang bisa digunakan dalam perberdayaan. Departemen Sosial Republik Indonesia menyebutnya dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat di gunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. PSKS dapat berasal atau bersifat manusiawi,

sosial dan alami namun dalam hal ini difokuskan pada manusiawi dan sosial antara lain: Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS), Karang Taruna, Dunia Usaha (DU), Wahana kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).

Dinas Sosial (DINSOS) sebagai bagian dari Departemen Sosial yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program PSKS Departemen Sosial, demikian juga Dinas Sosial Kabupaten Jember. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam salah satu programnya adalah melakukan pemberdayaan terhadap kelompok Karang Taruna (KT) di desa atau kelurahan yang masuk dalam kelompok PSKS yang disasar oleh Departemen Sosial. Untuk Kabupaten Jember ada sekitar 210 Karang Taruna yang tersebar diberbagai desa di Kabupaten Jember. Depsos, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Jember menjalin kemitraan dengan Karang Taruna (KT). Dinas Sosial dalam kemitraannya dengan Karang Taruna, melakukan pembinaan dengan menempatkan Karang Taruna (KT) sebagai energi sosial yang sangat potensial dan bisa diandalkan. Karang Taruna sebagai lini terdepan dalam rangka pemberdayaan masyarakat bisa digunakan didalam berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan, seperti kegiatan usaha ekonomi produktif dan penanggulangan bencana. Kemitraan yang dijalin antara Dinas Sosial dengan Karang Taruna adalah berbentuk pemberdayaan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan untuk mencapai kemandirian yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan anggota Karang Taruna.

Dinas Sosial dalam upaya pemberdayaan Karang Taruna merupakan organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah Desa/Kelurahan atau komunikasi adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Karang taruna, melakukan beberapa peran, peran yang dilakukan oleh dinas sosial diantaranya adalah peran fasilitatif dan peran edukasional. Menurut Ife dalam Isbandi (2008:89), dari peran fasilitatif terdapat tujuh peran khusus, yaitu animasi

sosial (*social animation*), mediasi dan negosiasi (*Mediation and negotiation*), pemberi dukungan (*support*), membentuk konsensus (*building consensus*), fasilitasi kelompok (*group facilitation*), pemanfaatan sumber daya dan keterampilan (*utilization of skills and resources*), dan mengorganisasi (*organizing*). Sedangkan peran edukasional meliputi empat peran yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat (*consciousness rising*), menyampaikan informasi (*informing*), mengonfrontasikan (*confronting*), dan pelatihan (*training*).

Dalam kaitannya dengan peran yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten jember Payne dalam Isbandi (2008:77) mengemukakan bahwa pemberdayaan pada intinya, ditujukan guna :

”membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya”

Karang Taruna merupakan organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah Desa/Kelurahan atau komunikasi adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Karang taruna sebagai wadah pemberdayaan tentu saja mempunyai beberapa program yang akan dilaksanakan dan melibatkan seluruh komponen dan potensi yang ada di Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial. Karang Taruna mempunyai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama dibidang kesejahteraan sosial. Sebagai Lembaga atau Organisasi yang bergerak di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan berfungsi sebagai

subyek. Karang Taruna sedapat mungkin mampu menunjukkan fungsi dan peranannya secara optimal.

Karang Taruna mempunyai kemampuan untuk menghimpun dana dengan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swadaya masyarakat untuk pelaksanaan program kegiatannya. Beberapa program Usaha Kesejahteraan Sosial Karang Taruna dapat di konstribusikan dengan lembaga atau organisasi lain dan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, antara lain : Pencegahan/preventif terhadap tumbuhnya kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan lain-lain melalui kegiatan olah raga, kesenian dan rekreasi dan lain-lain. Selain itu karang taruna juga bisa melakukan Pelayanan dan rehabilitasi sosial antara lain: kebersihan lingkungan, penyantunan para penyandang cacat anak terlantar secara rujukan maupun langsung, penyantunan para korban bencana dan lain-lain. Pengembangan melalui kerjasama dengan organisasi sosial yang ada, pembentukan Kelompok Usaha Bersama, ketrampilan ekonomi produktif. Karang taruna bisa diarahkan pada program Kependudukan dan lingkungan hidup, kesehatan dan gizi, KB, serta pertanian.

Program-program tersebut bersifat fleksibel (dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan dan kondisi), mengembangkan dan tuntas tanpa menimbulkan akses-akses negatif. Adapun fungsinya antara lain: sebagai pencegahan, rehabilitasi, pengembangan dan penunjang. Selain dari program, banyak kegiatan yang dapat diprogramkan untuk membangun Desa/Kelurahan khususnya pada bidang kesejahteraan sosial. Tugas pokok Karang Taruna secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Fungsi Karang Taruna yang dirumuskan dalam Permensos RI Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, yaitu :

1. Penyelenggaraan usaha Kesejahteraan sosial.

2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat.
3. Penyelenggara Pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan.
4. Penyelenggara Kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi pemuda dilingkungannya.
5. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
6. Penumbuhan dan Pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai NKRI.
7. Pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.
8. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
9. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
10. Penyelenggara Usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Dari sudut pandang yuridis formal, keberadaan Karang Taruna telah memiliki berbagai ketentuan yang dapat digunakan sebagai landasan operasional. Ketentuan tersebut antara lain:

1. Ketetapan MPR Nomor : II/MPR/1983 yang menetapkan karang taruna sebagai salah satu wadah pengembangan generasi muda, disamping OSIS, KNPI, dan Pramuka.
2. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor :13/HUK/KEP/1/1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna.

3. Keputusan Menteri Sosial RI. Nomor : 11/HUK/1988 Tentang Pedoman Karang Taruna dan terahir Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 83/HUK/2005 tentang pedoman dasar Karang Taruna yang merupakan landasan hukum terhadap keberadaan Karang taruna Sebagai Organisasi sosial kepemudaan yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang berada diseluruh penjuru negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan program pemberdayaan Karang Taruna, Dinas Sosial Kabupaten Jember membentuk tim yang terdiri dari bebera orang khusus menangani Karang Taruna. Beberapa program pemberdayaan yang telah diberikan Dinas Sosial Kabupaten Jember terhadap Karang Taruna Tunas Bangsa Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji adalah melakukan pendampingan dengan pola pengembangan SDM berupa pendidikan dan latihan serta bantuan modal berupa alat produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi

Karang taruna Tunas Bangsa desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam usaha kesejahteraannya bergerak dalam usaha jasa bengkel motor dan usaha pembuatan sepatu sandal. Karang Taruna Tunas Bangsa resmi dibentuk ahir tahun 2008 dengan jumlah keanggotaan 24 pemuda. Lokasi bengkel motor dan usaha pembuatan sepatu dan sandal berada di gedung Sinder PTPN XI dusun Loji Lor Desa kaliwining.

Seperti yang penulis telah sebutkan di atas dalam proses pemberdayaannya Dinas sosial Kabupaten Jember melakukan pendampingan dan pembinaan. Seperti memberikan pelatihan keterampilan perbengkelan serta pembuatan sepatu.

Tabel 1.1 Kegiatan Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Karang Taruna Tunas Bangsa Desa Kaliwining

<b>NO</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Jumlah Peserta</b>	<b>Target</b>
01	Pelatihan Montir Otomotif	8 Orang	Peserta Mengetahui dasar-dasar perbengkelan
02	Pelatihan Pembuatan Sepatu	24 Orang	Memahami Pola

			desain Pembuatan Sepatu
03	Melibatkan Karang taruna Tunas bangsa Dalam Pameran Produk Unggulan Kabupaten Jember	-	Palatihan pengenalan konsep pemasaran produk
04	Pelatihan Pembuatan Sandal	24 Orang	Mengetahui Tehnik Dasar Pembuatan Sandal
05	Mendelegasikan Karang Taruna dalam jambore karang taruna se-jawa timur di kota surabaya	7 Orang	

Sumber : Data Primer diolah 2010

Selain memberikan bimbingan teknis Dinas sosial kabupaten Jember juga memberikan modal berupa mesin alat produksi pembuatan sepatu sandal.

Tabel 2.1 Bantuan alat-alat produksi pembuatan sepatu dan sandal dari Dinas Sosial Kabupaten Jember terhadap Karang Taruna Tunas Bangsa Kaliwining.

<b>NO</b>	<b>Nama Alat</b>	<b>Jumlah</b>
01	Lis Sandal Laki-laki	30 Pasang
02	Lis Sandal Wanita	30 Pasang
03	Lis Ballet	30 Pasang
04	Mesin Jahit	20 Buah
05	Palu	20 Buah
06	Gunting	20 Buah
07	Mesin Press	1 Buah
08	Mesin Plong	1 Buah
09	Gerinda	1 Buah
10	Kompresor	1 Buah
11	Klebut	15 Seri
12	Pisau Plong	10 Buah

13	Pengot	10 Buah
14	Batu Ungkal	20 Buah

Sumber: Data Primer diolah 2010

Usaha ini tidak selamanya berjalan dengan baik, usaha tersebut mengalami kondisi pasang surut dan dinamika mulai dari awal sampai sekarang. Memasuki medio pertengahan 2009 usaha pembuatan sepatu dan sandal mengalami kemunduran, akibat produk yang kurang terserap pasar, mahalnya bahan baku pembuatan sepatu sandal, dan kurang kuatnya modal untuk produksi. Produksi sepatu dan sandal semakin menurun ketika memasuki awal tahun 2010. Perbedaan mencolok dari tahun sebelumnya terletak pada kapasitas produksi dan jumlah tenaga pekerja yang semakin menyusut akibat penyesuaian dengan kemampuan produksi. Kapasitas produksi disesuaikan dengan order atau pesanan pasar, berbeda dengan sebelumnya yang kapasitas produksinya bisa dilakukan secara berkesinambungan. Hal tersebut berpengaruh pada pendapatan dan jumlah anggota Karang Taruna yang terlibat dalam usaha pembuatan sepatu tersebut.

Tabel 3.1 Perkembangan Usaha Sepatu Karang Taruna, Jumlah Pekerja, dan Pendapatan Anggota

No	Periode Kegiatan	Jumlah Anggota yang Terlibat	Kapasitas Produksi	Pendapatan Rata-Rata Anggota
1	2008	24 Anggota	600 Kodi	Rp 1.200.000
2	2009	19 Anggota	250 Kodi	Rp 835.000
3	2010	21 Anggota	300 Kodi	Rp 720.000

Sumber: Data Primer diolah 2010

Dari tabel tersebut dapat dilihat bagaimana perkembangan usaha sepatu yang dilakukan oleh Anggota Karang Taruna dari tahun-ketahun mengalami penurunan kapasitas produksi sehingga berpengaruh pada jumlah anggota yang bisa dilibatkan dan pendapatan anggota juga semakin menurun. Kurang terserapnya hasil produksi

oleh pasar menjadi penyebab penurunan tersebut. Hasil produksi masih kalah dengan hasil produk-produk yang sejenis. Hal itu disadari betul oleh pengurus karang taruna, minimnya kemampuan menjemen produksi dan pemasaran, serta masih minimnya teknik penguasaan untuk pengembangan jenis dan model sepatu ikut juga ditengarai kurang terserapnya produk dipasaran. Penyebab paling utama menurut pengurus Karang Taruna adalah terkendala masalah akses modal yang masih minim.

Penulis memilih konsep pemberdayaan sebagai faktor penyebab kesejahteraan dalam penelitian ini didasari atas beberapa pertimbangan. *Pertama*, Relevansi dengan program studi Ilmu administrasi Negara. Hal in berkaitan dengan lembaga pemerintah yaitu dinas sosial yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap masalah kesejahteraan. Tugas pokok atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pada dasarnya mencakup kewajiban melindungi rakyat (*to protect the people*), mengatur rakyat (*to regulate the people*), dan melayani rakyat (*to serve the people*). Disamping itu pemberdayaan merupakan kebijakan sosial pemerintah. Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur urusan kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat ntuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenhi kebtuhan masyarakat banyak. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith dalam Suharto (2007:10) mengemukakan, secara singkat kebijakan sosial mennjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya. Sebagai sebah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (developmental). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif ntuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif), dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya. *Kedua*, secara konseptual berhasil atau tidaknya pemberdayaan yang dilakukan

dinsos terhadap karang taruna salah satunya dapat dilihat dari tingkat pencapaian keberdayaan atau kesejahteraan anggotanya.

Berangkat dari uraian diatas, apakah pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten jember terhadap karang taruna selama ini berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan anggotanya atau tidak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pengaruh Pemberdayaan Karang Taruna Di Desa Kaliwining Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anggota Karang Taruna Desa Kaliwining.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setiap penelitian berangkat dari suatu masalah. Masalah ini mendorong manusia untuk segera memecahkannya, maka penelitian merupakan salah satu cara yang dipakai. Menurut Tuckman dalam Sugiyono, (2001:36) menyatakan bahwa: “Rumusan masalah yang baik adalah menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, dinyatakan dalam kalimat tanya atau alternatif tetapi secara implisit mengandung pertanyaan”.

Kemudian Nawawi (1998: 41-42) berpendapat bahwa:

“Masalah muncul karena tidak terdapatnya keseimbangan antara sesuatu yang diharapkan (das sollen) berdasarkan teori-teori atau hukum-hukum yang menjadi tolak ukur (das sein) sehingga menimbulkan pertanyaan. Disamping itu masalah dapat pula muncul karena keragu-raguan keadaan sesuatu sehingga ingin diketahui keadaannya secara mendalam dan obyektif”.

Masalah penelitian akan tampak lebih tegas dan jelas jika dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, seperti yang ditegaskan Arikunto (1989:41) bahwa, masalah atau problematika adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yang jawabannya akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan, yaitu berupa kesimpulan penelitian.

Penelitian ini akan mengkaji masalah yang dihadapi Karang Taruna, dalam hal ini faktor kemandirian untuk menjalankan unit usahanya setelah dilakukan pemberdayaan dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan anggotanya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Adakah Pengaruh Pemberdayaan Karang Taruna Desa Kaliwining Terhadap tingkat kesejahteraan Anggotanya.**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara metodologis, tujuan penelitian biasanya merupakan rumusan kalimat yang meunjukkan adanya suatu hal yang akan didapatkan setelah penelitian selesai dilakukan. Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah. Menurut Arikunto (1989:41), bahwa kalau masalah penelitian dirumuskan dalam kalimat pertanyaan, maka tujuan penelitian biasanya dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Dengan memiliki tujuan, menunjukkan bahwa penelitian tersebut memiliki manfaat. Adapun tujuan dari penelitian adalah : **Untuk menngambarkan adanya pengaruh Pemberdayaan Karang Taruna Desa Kaliwining Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anggotanya.**

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, merupakan pengalaman yang sangat berharga dan sebagai media penggalian potensi diri.
2. Bagi akademisi, diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan, informasi dan motivator untuk melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi Dinas sosial Kabupaten Jember, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan rekomendasi dalam melaksanakan peran fungsinya, terutama dalam proses pemberdayaan Karang Taruna di Kabupaten Jember
4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi informasi pola pengembangan Karang Taruna Desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka dalam bab ini mengandung pengertian kerangka dasar teori dan konsep. Penelitian ini memandang perlu adanya sebuah kajian pustaka untuk menjawab dan memecahkan masalah penelitian secara teoritik maupun konsep, dalam kaitannya dengan hubungan antara konsep pemberdayaan Karang Taruna dengan peningkatan kesejahteraan anggota karang taruna. Untuk itu perlu dikemukakan pengertian teori dan fungsinya dalam suatu penelitian.

Adanya landasan teori ini merupakan ciri bahwa penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Hoy dan Miskel (dalam Sugiono:2005) mendefinisikan teori sebagai berikut: "teori adalah serangkaian seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berorganisasi".

Menurut Mely G. Tan dalam Koenjtara Ningrat (1986:19), mengatakan bahwa teori adalah pernyataan mengenai sebab akibat, atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Black n Champion dalam Zamroni (1992:2) mengemukakan, bahwa suatu teori akan diakui apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sekumpulan ide yang dikemukakan mempunyai hubungan logis dan konsisten.
2. Sekumpulan ide yang dikemukakan harus mencakup seluruh variabel yang diperlukan untuk menerangkan fenomena yang dihadapi.
3. Kumpulan ide tersebut mengandung proposisi-proposisi dimana ide yang satu dengan dengan yang lain tidak tumpang tindih.
4. Kumpulan ide tersebut dapat diuji atau dites secara empirik.

Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah sebagai titik tolak pemikiran, yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Dengan demikian teori dapat digunakan untuk mengembangkan hipotesis.

Berkaitan dengan konsep selanjutnya dijelaskan bahwa : "konsep istilah yang bersifat abstrak dan bermakna generalisasi". Keberadaan dari konsep dasar ini akan memberikan gambaran awal mengenai alur penelitian yang kemudian akan dijadikan analisis selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep dasar teori yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata "power" (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas (a) mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan (*empowerment*) atau pembangunan (*development*). Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada rakyat (*people centred development*). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal dalam mewujudkan kesejahteraan.

Menurut Kabeer (1994) yang berpendapat bahwa ketidak berdayaan bukan menunjuk pada tidak adanya kekuatan sama sekali. Dalam realitas. Mereka yang nampaknya hanya memiliki sedikit kekuatan justru mampu untuk bertahan

menggulingkan bahkan mentransformasikan kondisi hidup mereka. Jadi kekuatan itu ada, hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkan. Asumsi tersebut didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh Talcott Parsons yang membedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi, yaitu distributif dan generatif. Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain. Sedangkan dimensi generatif kekuasaan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkan masyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masa depan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri.

Dalam Teorinya, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan (terpenuhinya kebutuh dasar hidup) manusia yang membutuhkan pelayanan sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Edi Suharto (22:2006) mengatakan:

”pemberdayaan merupakan penguatan kapasitas para penerima pelayanan sosial sehingga memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (sejahtera)”

Sementara dalam Pre-conference working Committee for the XVth Internacional Conference of Social Welfare, memahami pemberdayaan sebagai usaha kesejahteraan Sosial yang bisa meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup manusia, seperti yang dikemukakan dalam Isbandi (4:2003):

”Pemberdayaan merupakan keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya”

Dari kedua teori tersebut sekurang-kurangnya dapat ditangkap pengertian bahwa pemberdayaan mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu fisik, mental, emosional, sosial ekonomi ataupun kehidupan spiritual.

Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan beragam definisi pemberdayaan yang dapat membantu menjelaskan hubungan antara pemberdayaan dan kesejahteraan:

Ife dalam Suharto (2006:58) mengatatakan :

”Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung”

Parsons dalam Suharto (2006 : 58), menyebutkan:

”Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatian”.

Swift dan Levin dalam Suharto (2006 : 59), menyebutkan:

”Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial”.

Rappaport dalam Edi Suharto (2006 : 59), menyebutkan:

”Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya”.

Menurut Ife dalam Edi Suharto (2006 : 59), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaran dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide aatau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

4. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
5. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-umber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi : kemampuan mengelola dan memanfaatkan mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa.
7. Reproduksi : kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan, dan sosialisasi.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, dalam hal ini Edi Suharto (2006:59) mengatakan bahwa,

”Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, amaka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya”.

Pemberdayaan adalah bentuk kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang berorientasi pada timbulnya tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap Karang Taruna adalah dengan cara menggunakan pendekatan institusional. Menurut Sumarnonugroho (1991:19), pendekatan institusional condong kepada usaha mengadakan *perubahan berencana*. Tujuan perubahan berencana adalah untuk mendapatkan sesuatu bentuk perubahan yang lebih manusiawi dan efektif. Menurut Korten (2001:110)

“Pembangunan yang berpusat pada manusia adalah proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memotivasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka”

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pemberdayaan memfokuskan perhatian dan mengarah pada peningkatan kapasitas individu atau institusi yaitu karang taruna dan anggotanya dalam rangka mensejahterakan masyarakat secara merata.

Wilensky dan Lebeaux dalam Sumarnonugroho (1991:29) merumuskan tentang usaha kesejahteraan sosial (pemberdayaan) sebagai :

“Suatu sistem yang terorganisasi daripada usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar supaya individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraannya sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat”

Sedangkan Friendlander dalam Sumarnonugroho (1991:31) mengemukakan definisi usaha kesejahteraan sosial seperti berikut:

“Kesejahteraan sosial” adalah suatu sistem terorganisasi daripada pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat”

Dalam hal ini Friendlander mengedepankan usaha kesejahteraan sosial (pemberdayaan), yaitu untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak, mendapatkan kesempatan-kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, kebebasan berfikir dan melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak-hak azasi seperti yang dimiliki sesamanya.

Dalam kerangka pemikiran ini. Upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan

bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, Memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah positif dan nyata. Penyediaan berbagai masukan (*in-put*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat berbagai masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang. Ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Keberdayaan dalam masyarakat ditandai dengan adanya perubahan dalam sikap, tata nilai dan pola pikir ke arah yang lebih baik, bentuk partisipasi, merasa memiliki, dan bertanggung jawab terhadap apa yang diamanatkan merupakan sikap masyarakat yang berdaya.

## **2.1 Pemberdayaan Karang Taruna**

Dalam konsep ini, ada dua istilah yang dipandang perlu diuraikan disini, yaitu istilah pemberdayaan dan Karang Taruna. Kedua kata tersebut kemudian membentuk pengertian tersendiri.

Pemberdayaan menurut Payne dalam Isbandi (2008:77) mengemukakan bahwa pemberdayaan pada intinya, ditujukan guna :

”Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya”

Sedangkan menurut Sumodiningrat dalam Pairan (2006:81) mengemukakan, ”Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita karena ketidak mampuan untuk

melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Ke-berdayaan adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan ide dan mencapai tujuan”.

Dalam pemberdayaan ada 2 Peran yang bisa dilakukan yaitu peran Fasilitatif.

Peran fasilitatif meliputi :

- a. Animasi sosial; peran membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat, termasuk didalamnya mengaktifkan, menstimulasi, dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak.
- b. Mediasi dan negoisasi; mempertemukan atau mendamaikan konflik dalam kelompok.
- c. Memberi dukungan; menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut.
- d. Membentuk konsensus; kelanjutan dari peran mediasi, penekana terhadap tujuan umum bersama, mengidentifikasi landasan dasar yang sama dari beberapa pihak dalam masyarakat, dan membantu masyarakat untuk bergerak ke arah pencapaian konsensus.
- e. Fasilitasi kelompok; membantu kelompok atau komunitas untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- f. Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan; mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumberdaya yang ada dalam komunitas atau kelompok. dan
- g. Mengorganisasi.

Sedangkan peran edukasional yang dilakukan dinas sosial kabupaten jember meliputi :

- a. Membangkitkan kesadaran masyarakat; mmbantu individu melihat permasalahan, impian, aspirasi, penderitaan ataupun kekecewaan mereka dari perspektif sosial politik yang lebih luas.
- b. Menyampaikan Informasi; memberikan informasi penting dan mungkin belum diketahui oleh komunitas sasarnya.
- c. Pelatihan; upaya mengajarkan komunitas sasaran bagaimana cara melakukan sesuatu hal yang akan berguna bagi mereka secara khusus.

Subjek pemberdayaan bisa dilakukan baik oleh individu maupun oleh kelompok atau organisasi. Dmikian juga objek pemberdayaan, bisa menunjuk pada individu, kelompok atau oganisasi. Sebagai subjek dalam konsep pemberdayaan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Jember. Sedangkan objeknya adalah Karaang Taruna desa Kaliwining Rambipuji yan ada dibawah binaannya. Karang Taruna bulan individu tapi sekumpulan orang atau individu yang berarti organisasi, berarti ojek pemberdayaannya adalah organisasi yaitu Karang Taruna.

Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Fungsi Karang Taruna yang dirumuskan dalam Permensos RI Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, yaitu :

1. Penyelenggaraan usaha Kesejahteraan sosial.

2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat.
3. Penyelenggara Pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan.
4. Penyelenggara Kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi pemuda dilingkungannya.
5. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
6. Penumbuhan dan Pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai NKRI.
7. Pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.
8. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
9. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
10. Penyelenggara Usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Dalam konsep tersebut karang taruna mengandung pengertian yang bersifat dinamis dan statis. Dalam pengertian dinamis, karang taruna adalah organisasi yang mempunyai potensi dalam bidang Usaha kesejahteraan yang sesuai dengan kemampuan karang tarunanya. Pengertian ini mengandung makna dinamis, dalam arti bahwa apabila potensi kemampuan mengelola organisasi, modal serta keterampilan bertambah besar, maka organisasi tersebut akan mempunyai kemampuan mengembangkan organisasinya membuat usaha mandiri. Dalam pengertian statis, Karang Taruna adalah organisasi adalah sekumpulan orang yang bergerak dibidang usaha tertentu seperti home industri pembuatan sepatu seperti yang dilakukan oleh

Karang Taruna Kaliwining memang memerlukan kemampuan mengelola dan berorganisasi, modal serta keterampilan dalam mengelola usahanya.

Dinas Sosial Kabupaten Jember melakukan pemberdayaan terhadap karang taruna sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi yang menangani kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial republik Indonesia Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna Menteri Sosial republik Indonesia. Dalam Peraturan menteri tersebut Departemen Sosial adalah Pembina fungsional untuk tingkat pusat dan Dinas Sosial Pembina Fungsional untuk tingkat daerah.

## **2.2 Kesejahteraan Anggota Karang Taruna**

Kesejahteraan erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Ellis (dalam Suharto : 2005) menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat di definisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini tidak hanya menyangkut aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat di ukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari adalah contoh pengukuran kemiskinan absolut.

”Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untu makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo

per kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya". (BPS dan Depsos, 2002:4)

Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Depsos, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Depsos, 2003:3). Yang dimaksud kebutuhan pokok dalam definisi tersebut adalah kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Untuk mencapai tingkat sejahtera Menurut Spicker dalam Isbandi (2008:03) harus mampu memenuhi sekurang-kurangnya lima aspek utama yang harus diperhatikan. Kelima aspek ini dikenal dengan istilah "*big five*", yaitu: 1) kesehatan; 2) pendidikan; 3) perumahan; 4) jaminan sosial; dan 5) pekerjaan sosial. Selain Spicker, banyak ahli lain yang mengemukakan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji indikator kesejahteraan sosial, misalnya, aspek fisik, aspek ketenagakerjaan, dan ekonomi masyarakat.

Zastrow memberikan indikator kesejahteraan yang lebih lengkap dari aspek-aspek yang dikemukakan oleh Spicker. Zastrow dalam Isbandi (2008:4) memberikan aspek rekreasional sebagai indikator kesejahteraan sosial. Zastrow memandang bahwa aspek rekreasional adalah salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, diluar dari berbagai aspek di atas. Maka, bila digabungkan, sekurang-kurangnya ada sembilan aspek (indikator besar) yaitu: 1) aspek fisik; 2) aspek perumahan; 3) aspek pendidikan; 4) aspek kesehatan; 5) aspek tenaga kerja; 6) aspek ekonomi masyarakat; 7) aspek jaminan sosial; 8) aspek rekreasional; dan 9) aspek pekerjaan sosial.

Kesembilan aspek tersebut merupakan indikator dari pembangunan kesejahteraan dalam arti luas. Disamping itu, masing-masing aspek tersebut (indikator) ini mempunyai berbagai turunan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan yang sifat berlakunya masih sementara, karena kebenarannya masih harus dibuktikan melalui uji hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan. Menurut Sugiono (2004:183), Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Pengertian hipotesis tersebut adalah untuk hipotesis penelitian. Sedangkan secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian (statistik). Jadi maksudnya adalah taksiran keadaan populasi melalui data sampel. Oleh karena itu dalam statistik yang di uji adalah hipotesis nol.

Menurut Surakhmad (1990:72), ada dua macam hipotesis yaitu hipotesis kerja atau hipotesis alternatif dengan simbol  $H_a$  dan hipotesis nol dengan simbol  $H_0$ . Hipotesis kerja menyatakan ada hubungan, atau beda, atau pengaruh variabel bebas (independent variabel) terhadap variabel terikat (dependent variabel). Sebaliknya, hipotesis nol menyatakan tidak ada hubungan, atau beda, atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Emory dalam Sugiono (2004:183) mengatakan, "*The null hypothesis is used for testing. It is statement that no different exist between the parameter and statistic being compared*". Jadi hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel). Lawan dari hipotesis nol adalah hipotesis alternatif, yang menyatakan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Hipotesis nol diberi notasi  $H_0$ , dan hipotesis alternatif diberi notasi  $H_a$ .

Berdasarkan kerangka teori yang di singgung dalam tinjauan pustaka diatas, dua macam hipotesis tersebut dirumuskan dalam pernyataan sebagai berikut :

**Ha : Ada pengaruh pemberdayaan dinas sosial terhadap kesejahteraan anggota karang taruna kaliwining**

**Ho : Tidak ada pengaruh pemberdayaan dinas sosial terhadap kesejahteraan anggota karang taruna kaliwining**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, artinya hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis nol dengan menggunakan teknik statistik relevan dengan jenis data.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan metode penelitian, menurut Sugiyono (2000:2) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional, berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh manusia. Empiris, berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati cara-cara yang digunakan. Sistematis, artinya proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Dengan menggunakan metode yang tepat diharapkan nantinya penelitian yang akan dilakukan dapat mencapai hasil yang sesuai. Dalam metode penelitian ini hal-hal yang diperlukan antara lain :

1. Metode Pendekatan
2. Penentuan Lokasi Penelitian
3. Desain Penelitian
4. Penentuan Populasi
5. Penentuan Sampel
6. Jenis dan Sumber Data
7. Definisi Operasional
8. Metode Pengumpulan Data
9. Metode Analisis Data

#### **3.1 Metode Pendekatan**

Penelitian ini termasuk kategori penelitian dengan metode pendekatan kuantitatif. Yang lazim disebut penelitian *kuantitatif*. Menurut Sugiyono (2006:8), disebut sebagai metode kuantitatif karena data penelitian yang dihasilkan berupa

angka-angka. Dalam penelitian sosial, jika data yang dikumpulkan berupa kata-kata, maka data itu dikuantifikasikan atau diubah menjadi data dalam angka-angka, dan metode analisis yang digunakan adalah statistik. Pemilihan pendekatan kuantitatif ini didasari pertimbangan subjektif, bahwa penulis memang tertarik pada pendekatan kuantitatif ini.

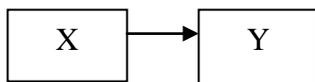
### 3.2 Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Pemilihan Lokasi ini didasari dua alasan, yaitu alasan objektif dan alasan subjektif. Secara objektif, pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan, bahwa Dinas sosial adalah organisasi publik, dan secara nyata telah melakukan pemberdayaan terhadap karang taruna.

Secara subjektif, pemilihan lokasi penelitian di desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember ini didasari pertimbangan pribadi, yaitu penulis tertarik dengan Karang Taruna, masalah kesejahteraan, atas saran dan rekomendasi dari Dinas sosial Kabupaten Jember serta lokasi dekat dari tempat domisili penulis sehingga bisa menghemat waktu, tenaga dan biaya untuk pengumpulan data.

### 3.3 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian yang menunjukkan hubungan antara satu variabel bebas ( X ) dan satu variabel terikat ( Y ), yang disajikan dalam gambar berikut



X : Variabel Bebas (Kemampuan Pegawai)

Y : Variabel Terikat (Kualitas Pelayanan)

### **3.4 Penentuan Populasi**

Dalam penelitian kuantitatif data penelitian bersumber dari populasi. Mantra dan Kastro dalam Singarimbun dan Effendi (Ed. 1988:108) mendefinisikan, bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Definisi serupa ditegaskan oleh Arikunto (1989:90-93), bahwa populasi adalah keseluruhan Subjek penelitian. Kemudian menurut Sugiyono (2006:89), bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kalitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi merupakan keseluruhan objek/subjek penelitian. Populasi bukan hanya berwujud manusia, melainkan bisa benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala nilai tes, peristiwa-peristiwa dan sebagainya sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi bisa disebut sebagai subjek apabila yang dimaksud adalah karakteristik tertentu yang akan menjadi data; dan populasi disebut sebagai objek bila yang dimaksud adalah manusia, benda dan sebagainya yang memiliki karakteristik itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota karang taruna Tunas Bangsa desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Berdasarkan observasi awal, jumlah anggota karang taruna aktif sebanyak 24 orang, dengan kegiatan usaha kerajinan pembuatan sepatu.

### **3.5 Penentuan Sampel**

Kalau populasi adalah seluruh jumlah objek atau subjek yang akan diteliti, sampel adalah sebagian dari populasi. Menurut Arikunto (1989:90-93), jika seorang hanya akan meneliti sebagian saja dari populasi, maka penelitiannya, penelitian sampel. Dinamakan penelitian sampel jika penelitian itu bermaksud menggeneralisasikan hasil penelitian, yakni hanya meneliti sebagian dari populasi tetapi hasilnya diberlakukan bagi seluruh populasi.

Sebenarnya belum ada ketentuan yang baku, berapa jumlah sampel harus diambil dari populasi. Berkenaan dengan hal ini Sugiyono (2006) mengemukakan sebagai berikut:

“Berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat harus diambil dari populasi dalam penelitian? Jawabnya tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkat kesalahan yang dikehendaki, maka semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan. Sebaliknya, makin kecil tingkat kesalahan yang dikehendaki, maka semakin besar sampel yang diperlukan sebagai sumber data”.

Prinsip pengambilan sampel adalah representatif, artinya bahwa sampel yang diambil sedapat mungkin mewakili populasi. Oleh karena itu semakin banyak sampel adalah semakin baik, karena semakin mendekati populasi. Sehingga peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel semakin jauh dari populasi, akibatnya semakin besar peluang kesalahan generalisasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel jenuh atau sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel mengingat anggota Karang Taruna hanya 24 orang. Menurut Sugiono (2004:96) sampling jenuh adalah tehnik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.

### **3.6 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian berkenaan dengan sumber-sumber penyedia informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian penelitian. Menurut sumbernya (Azwar: 1998), data penelitian digolongkan menjadi data primer data sekunder.

#### **a) Data Primer atau data tangan pertama**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber

informasi yang dicari. Dimana data primer ini didapat atau diperoleh melalui kuesioner dan wawancara.

b) Data Sekunder atau data tangan kedua

Yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia seperti arsip, laporan, dll.

### 3.7 Definisi Operasional

Menurut Koentjaraningrat (1985:23), bahwa definisi operasional adalah mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk itu, dengan kata-kata yang membenarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Konsep-konsep yang masih abstrak melalui definisi operasional tampak menjadi gejala, menjadi yang kongkrit dan gampang diamati.

Ada dua konsep dasar dalam penelitian ini, yaitu konsep pemberdayaan karang taruna dan konsep tingkat kesejahteraan. Kedua konsep tersebut berkedudukan sebagai variabel penelitian. Jadi penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu konsep pemberdayaan karang taruna sebagai variabel bebas (*independent variable*) dengan simbol X, dan konsep tingkat kesejahteraan sebagai variabel terikat (*dependent variable*) dengan simbol Y. Kedua variabel bisa diukur setelah melalui operasionalisasi konsep. Caranya adalah dengan menurunkan masing-masing variabel kedalam sejumlah indikator. Kemudian indikator-indikator tersebut lebih lanjut bisa diturunkan lagi menjadi item-item gejala yang lebih operasional dan mudah diukur. Berikut ini adalah pengoperasionalan kedua variabel serta cara pengukurannya.

#### 3.7.1 Operasionalisasi Variabel X yaitu Pemberdayaan Karang Taruna

Pemberdayaan karang taruna dalam penelitian ini menunjuk pada kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember yang berupa bimbingan, pelatihan, bantuan alat produksi, bantuan permodalan, pengembangan sumberdaya

manusia, dan bantuan akses kemitraan. Bimbingan pendidikan dan pelatihan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh dingsos terhadap karang taruna bimbingannya sesuai dengan bidang usaha yang dilakukannya. Bantuan peralatan diberikan oleh dingsos kepada karang taruna untuk dijadikan sebagai alat usaha. Bantuan bimbingan permodalan adalah kegiatan bantuan pemberian modal untuk dijadikan modal operasional usaha. Bantuan akses kemitraan berupa kegiatan yang dilakukan oleh dingsos memediasi pihak karang taruna dengan pengusaha dalam rangka membangun kemitraan usaha. Sedangkan pengembangan sumberdaya manusia adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh dinas sosial kepada anggota karang taruna untuk meningkatkan keterampilan dan skill sesuai dengan bidang usaha yang dilakukannya. Variabel pengaruh ini bisa diukur dengan indikator-indikator berikut :

1. Peran Fasilitatif

- a. Peran membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat, termasuk didalamnya mengaktifkan, menstimulasi, dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak.
- b. Memberi dukungan; menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut
- c. Fasilitasi kelompok; membantu kelompok atau komunitas untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- d. Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan; mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumberdaya yang ada dalam komunitas atau kelompok

2. Peran Edukasional

- a. Membangkitkan kesadaran masyarakat; membantu individu melihat permasalahan, impian, aspirasi, penderitaan ataupun kekecewaan mereka dari perspektif sosial politik yang lebih luas.
- b. Menyampaikan Informasi; memberikan informasi penting dan mungkin belum diketahui oleh komunitas sasarannya.

- c. Pelatihan; upaya mengajarkan komunitas sasaran bagaimana cara melakukan sesuatu hal yang akan berguna bagi mereka secara khusus.

### **3.7.2 Operasionalisasi Variabel Y yaitu Tingkat Kesejahteraan Anggota**

Yang dimaksud dengan tingkat kesejahteraan dalam penelitian ini adalah naiknya tingkat derajat kesejahteraan dan kualitas hidup anggota karang taruna. Variabel terikat ini dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup
2. Meningkatnya wawasan, pengetahuan, dan kemampuan
3. Meningkatnya kapasitas produk usaha
4. Meningkatnya penghasilan (income)
5. Timbul sikap aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan organisasi
6. Kemampuan untuk mengelola (menajerial) organisasi dengan baik.

Data akan dikumpulkan berdasarkan gejala-gejala tersebut dengan instrumen berupa angket atau kuesioner dan wawancara terstruktur. setiap pertanyaan akan disediakan dua alternatif jawaban sesuai dengan Skala Guttman.

### **3.8 Metode Pengumpulan Data**

Dilihat dari sumbernya data penelitian dapat dibedakan kedalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Surakhmad (1990:163), bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber data, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber data.

#### ***a. Teknik Observasi***

Sutrisno Hadi dalam Sugiono (2003:166) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses –proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

**b. Teknik Kuesioner**

Teknik kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Sugiyono (2006:158), mendefinisikan kuesioner atau angket sebagai berikut:

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas”.

Dalam penelitian ini digunakan kuesioner terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Sugiyono (2006:160) menegaskan, bahwa dalam kuesioner dengan pertanyaan tertutup, responden diberikan sejumlah alternatif jawaban untuk dipilih salah satu yang dianggap paling sesuai dengan keadaannya atau hal-hal yang diketahuinya, sehingga responden tidak mempunyai alternatif untuk memilih jawaban lain, selain dari jawaban yang telah tersedia.

**c. Teknik Wawancara**

Disamping kuesioner, untuk mengumpulkan data primer penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara atau interview. Menurut Nawawi (1983:111) wawancara adalah:

“Interview adalah usaha untuk mengumpulkan data atau informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh sumber data atau responden. Ciri utama interview adalah kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relationship*) antara pencari informasi (*interviewer* atau *information hunter*) dengan sumber informasi”

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Sugiyono (2006:154) menyatakan, bahwa wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data (dalam hal ini penulis sendiri) telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya juga telah disediakan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama secara lisan untuk dijawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan secara sistematis.

Teknik wawancara atau interview digunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi teknik kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data primer. Dengan maksud ada yang diwawancarai dan ada yang dengan disuruh mengisi sendiri jawabannya.

#### *d. Teknik Dokumentasi*

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip, buku-buku, dan berbagai catatan tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Arikunto (1989:132) menegaskan, bahwa tidak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.

Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data sekunder. data sekunder dalam hal ini berupa arsip-arsip, peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan peran dan dan fungsi Dinas Sosial sebagai lembaga pembina karang taruna, dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

### **3.9 Metode Analisis Data**

Sesuai dengan pendekatan metode penelitian kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode analisis statistik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Effendi dan Manning dalam Singarimbun dan Effendi (Ed. 1988:216), bahwa tujuan analisis adalah menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan serta dipahami. Dalam proses ini sering kali digunakan statistik,

karena memang salah satu fungsi statistik adalah menyederhanakan data. Untuk itu, agar dapat dianalisis statistik, kalau data yang dikumpulkan itu kualitatif (berupa kata-kata) harus ditransfer ke dalam data kuantitatif. Data yang berupa angka-angka inilah yang akan diolah, dianalisis, diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban akhir atas masalah masalah penelitian ini.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian sosial. Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yakni uraian kata-kata. Agar data kualitatif dapat dianalisis menggunakan teknik statistik, penulis merubah data kualitatif itu menjadi data kuantitatif melalui proses skoring atau pemberian nilai angka terhadap setiap jawaban responden.

Setelah tahap perolehan data dilakukan maka langkah selanjutnya adalah dengan menganalisisnya menggunakan metode tertentu untuk dapat menguji hipotesisnya yang telah dirumuskan diterima atau ditolak. Peneliti harus menentukan metode analisis mana yang akan dipergunakan. Ada dua macam analisa yang sering digunakan seperti dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1977: 269), sebagai berikut:

“Sesungguhnya analisis data itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan ini sangat tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti.”

Kemudian Koentjaraningrat menambahkan ((1977:328) yang dimaksud dengan analisa kualitatif dan analisa kuantitatif adalah sebagai berikut

Apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi), maka analisisnya pasti kualitatif. Lain halnya jika data yang dikumpulkan itu besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori (dan oleh karenanya berstruktur), maka dalam hal demikian analisa kuantitatiflah yang harus dikerjakan.”

Adapun penentuan skor dari kuesioner yang diajukan kepada responden dengan menggunakan Skala Guttman. Menurut Sugiyono (2004:111) “skala pengukuran dengan tipe ini, akan didapat jawaban yang tegas, yaitu “ya-tidak”, “benar-salah”, “positif-negatif” dan lain-lain”. Data yang diperoleh dapat berupa data

interval atau rasio dikhotomi (dua alternatif). Penelitian dengan menggunakan skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan.

Mengenai analisa data yang digunakan oleh penulis adalah analisa kuantitatif, yaitu meyakinkan kebenaran dengan menggunakan metode statistik. Adapun ciri analisis kuantitatif adalah dapat dinilai dengan menggunakan angka. Setelah data terkumpul, maka dianalisis menggunakan statistik non parametrik yakni dengan analisis Chi Square ( $X^2$ ).

Adapun alasan penulis menggunakan analisis Chi Square ( $X^2$ ) adalah data yang digunakan berupa data nominal dengan sampel yang digunakan berjumlah 24 orang sehingga menggunakan analisis Chi Square ( $X^2$ ) untuk sampel kecil yaitu 20-40 (Siegle, 1997:137).

Adapun rumus Chi Square ( $X^2$ ) sebagai berikut :

$$X^2 = \frac{N \left[ (AD - BC) - \frac{N}{2} \right]^2}{(A + B)(C + D)(A + C)(B + D)}$$

KETERANGAN :

$X^2$  = Chi square

ABCD = Frekuensi yang diamati

(A+B) (C+D) = Jumlah Frekuensi dalam baris

(A+C) (B+D) = Jumlah frekuensi dalam kolom

N = Jumlah

Adapun langkah selanjutnya dari analisis data adalah pengukuran taraf signifikan dari hasil penelitian, menentukan taraf signifikan adalah 95% dengan taraf kesalahan 5%. Kemudian dianalisis dengan Chi Square yang menyatakan bahwa, “ Apabila angka  $X^2$  hitung lebih besar atau sama dengan  $X^2$  tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima ’ (Siegel,1997:137).

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Pengantar**

Karang Taruna merupakan organisasi sosial wadah pengembangan Generasi Muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa, dan karya dibidang Kesejahteraan Sosial. Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama dibidang kesejahteraan sosial.

Karang Taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan Generasi Muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Tujuan Karang Taruna adalah :

- a. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
- b. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan Generasi Muda warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.
- c. Tumbuhnya potensi dan kemampuan Generasi Muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna.
- d. Termotivasinya setiap Generasi Muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat.
- e. Terjalannya kerjasama antar Generasi Muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- f. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi Generasi Muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan

pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.

- g. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial Generasi Muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi Generasi Muda dilingkungannya.

#### **4.2 Sejarah Singkat Karang Taruna Tunas Bangsa Desa Kaliwining**

Karang Tarun Tunas Bangsa ini terletak di desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Karang Taruna Tunas Bangsa desa Kaliwining di benruk pada bulan Maret tahun 2007. Berdirinya Karang Taruna Tunas Bangsa diprakarsai oleh tiga pemuda desa Kaliwining yaitu: Bambang, SP, Yoyo kali sunarto, dan Musta'in.

Karang Taruna Tunas Bangsa berdiri berangkat dari keprihatinan tiga pemuda tersebut, melihat banyaknya pemuda desa kaliwining yang menganggur. Dengan dukungan yang luar biasa dari tokoh masyarakat dan perangkat desa Kaliwining, mereka bersepakat untuk mendirikan Karang Taruna yang diberi nama Tunas Bangsa. Diharapkan dengan berdirinya Karang Taruna di desa Kaliwining, mampu mengatasi persoalan pengangguran yang cukup banyak di desa tersebut.

Ahir tahun 2007, Karang Taruna Tunas Bangsa mulai merintis usahanya, meliputi usaha perbengkelan dan usaha Home Industri pembuatan sandal dan sepatu. Karang Taruna Tunas Bangsa sampai sekarang sudah mempunyai dua buah bengkel dan satu home industri pembuatan sandal dan sepatu. Lokasi bengkel dan tempat home industri berada di Sinder PTPN 10 dusun Loji Lor desa Kaliwining. Tempat

usaha pembuatan sepatu dan sandal sampe saat ini masih meminjam gedung miliknya PTPN 10. Sedangkan dua buah usaha bengkel yang mereka miliki, bangunannya milik sendiri.

Dengan modal dana patungan antar Bambang Hariyono, SP, Yoyok Ali sunarto, dan Musta'in. dibantu oleh beberapa pekerja yang terdiri dari anggota karang taruna mereka memulai memproduksi sepatu dan sandal. Usaha yang dilakukan oleh Karang Taruna Tunas Bangsa dibina oleh Dinas Sosial kabupaten Jember dengan mengadakan pelatihan manajemen pengelolaan organisasi dan pembuatan sepatu sandal pada tahun 2008. Dinas sosial Kabupaten Jember juga memberikan bantuan alat produksi berupa 20 mesin jahit, mesin pres, kompresor 2 buah, dan mesin plong. Selain itu Dinas Sosial juga sering mengajak Karang taruna tunas bangsa untuk mengikuti eksibisi pameran produksi home industry.

### **4.3 Visi, Misi Karang Taruna Tunas Bangsa Kaliwining**

#### 4.3.1 Visi.

Visi dari Karang Taruna Tunas Bangsa Adalah sebagai berikut: *“Menjadi Sentra Home Industri Unggulan Kabupaten Jember”*

#### 4.3.2 Misi

Misi Karang Taruna Tunas Bangsa adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan
2. Pemanfaatan Potensi Pemuda desa Kaliwining
3. Pengentasan Pengangguran
4. Terciptanya sikap kemandiri.
5. Terbentuknya jiwa wirausaha pemuda desa Kaliwining

#### 4.4 Susunan Personalia dan Keanggotaan Karang Taruna Tunas Bangsa

Berdasarkan data dari dokumen yang diperoleh penulis, berikut daftar susunan personalia Karang Taruna Tunas Bangsa Kaliwining:

Nomor	Nama	Jabatan
01.	H. M. Lutfi	Pembina
o2.	Bambang Hariyono, SP	Ketua
03.	Musta'in	Sekretaris
04.	Yoyok Ali Sunarto	Bendahara
05.	Soddik Mak'sum	Anggota
06.	Slamet	Anggota
07.	Yoyok	Anggota
08.	Wandoko	Anggota
09.	Fandik	Anggota
10.	Rahmat Hidayat	Anggota
11.	Mimin	Anggota
12.	Pipit	Anggota
13.	Datro	Anggota
14.	Roub	Anggota
15.	Imam	Anggota
16.	Lilik	Anggota
17.	Babun	Anggota
18.	Sigit	Anggota
19.	Ita	Anggota
20.	Evi	Anggota
21.	Lamita	Anggota
22.	Bahar	Anggoita
23.	Abdullah	Anggota
24.	Didik	Anggota

#### 4.5 Barang Inventaris Usaha Organisasi

Berdasarkan data dari dokumen yang diperoleh penulis, berikut daftar data inventaris kerja Karang Taruna Tunas Bangsa:

NO	Nama Barang	Jumlah
01.	Lis Sandal Laki-laki	30 Pasang
02.	Lis Sandal wanita	30 Pasang
03.	Lis Ballet	30 Pasang
04.	Mesin Jahit	20 Buah
05.	Palu	20 Buah
06.	Gunting	20 Buah
07.	Mesin Press	1 Buah
08.	Mesin Plong	1 Buah
09.	Gerinda	1 Buah
10.	Kompresor	1 Buah
11.	Klebut	15 Seri
12.	Pisau Plong	10 Buah
13.	Pengot	10 Buah
14.	Batu Ungkal	20 Buah

#### 4.6 Penyajian Data

Dalam bab ini akan disajikan data empiris yang didapatkan di lapangan sesuai dengan variabel penelitian. Data ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel penelitian. Adapun variabel penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a Variabel Pengaruh yaitu Pemberdayaan Karang Taruna (X), yang mempunyai indikator sebagai berikut :
  1. Peran Fasilitatif.
  2. Peran Edukasional.
- b Variabel Terpengaruh yaitu Variabel Terpengaruh (Y) Tingkat Kesejahteraan

#### 4.6.1 Variabel Pengaruh yaitu Pemberdayaan Karang Taruna (X)

Dalam konsep ini, ada dua istilah yang dipandang perlu diuraikan disini, yaitu istilah pemberdayaan dan Karang Taruna. Kedua kata tersebut kemudian membentuk pengertian tersendiri. Untuk mengetahui Pemberdayaan Karang Taruna dapat dilihat melalui peran fasilitatif dan peran edukasional.

##### a Peran Fasilitatif.

Indikator peran fasilitatif dapat diukur melalui item-item sebagai berikut :

- 1) Peran untuk memotivasi.
- 2) Peran memberi inspirasi.
- 3) Peran untuk menimbulkan rasa antusias.
- 4) Peran untuk mendukung kegiatan komunitas.
- 5) Peran untuk memberi fasilitas
- 6) Peran untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan Komunitas
- 7) Peran untuk memberikan bantuan modal financial
- 8) Peran untuk memberikan bantuan alat-alat produksi dari Dinas social  
Kabupaten Jember
- 9) Peran untuk membantu mengelola produk usaha
- 10) Peran untuk memfasilitasi informasi antar komunitas.

Tabel : 4.1 Data berdasarkan skor jawaban terhadap indikator Peran Fasilitatif

No. Responden	Item Pertanyaan										Total skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
2	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	5
3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
4	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	3
5	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	3
6	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	4
8	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
10	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	4
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
13	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	4
14	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
15	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
16	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	6
17	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	6
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
19	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	4
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	4
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
23	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	3
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	3

---

Sumber: Data Primer diolah 2010

b. Peran Edukasional

Indikator peran edukasional dapat diukur melalui item-item sebagai berikut :

- 1) Peran untuk memberikan informasi dan penjelasan yang baik dan benar.
- 2) Peran numbuhkan kesadaran pada komunitas.
- 3) Peran untuk memberikan pendidikan, dan pelatihan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan komunitas.
- 4) Peran untuk mendorong meningkatnya kapasitas kemampuan dan keterampilan komunitas.

Tabel 4.2 Data berdasarkan skor jawaban terhadap indikator Peran Edukasional

No. Responden	Item Pertanyaan				Total Skor
	1	2	3	4	
1	1	1	1	1	4
2	1	1	1	1	4
3	1	1	0	1	3
4	0	1	1	1	3
5	0	1	1	0	2
6	1	1	1	1	4
7	0	1	0	1	2
8	1	1	0	1	3
9	0	0	0	1	1
10	0	1	1	1	3
11	0	1	1	1	2
12	0	1	1	1	3
13	1	1	0	1	3
14	1	1	1	1	4
15	1	1	1	1	4
16	0	1	1	1	1
17	1	1	1	1	4
18	1	1	1	0	3
19	0	0	0	0	0
20	0	1	1	1	3

21	0	1	1	1	3
22	1	1	1	1	4
23	1	1	1	1	4
24	0	1	1	1	3

---

Sumber: Data Primer diolah 2010

Variabel pemberdayaan terdiri dari 2 indikator dan dari indikator tersebut mempunyai 14 item, maka untuk skor tertinggi adalah 14 dan skor terendah adalah 0 sehingga untuk interval kelasnya sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Jumlah Tertinggi} - \text{Jumlah Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$\text{Interval} = \frac{14 - 0}{2} = 7 \quad (\text{Hadi, 1989:212})$$

Dari hasil di atas maka diperoleh pengelompokan interval untuk mengetahui frekuensi profesionalisme pegawai sebagai berikut:

- a. Untuk total skor 0 – 7 termasuk dalam kategori rendah
- b. Untuk total skor 8 – 14 termasuk dalam kategori tinggi

Selanjutnya dari masing-masing indikator di atas disajikan atau digabung dalam satu tabel yang merupakan data keseluruhan dari variabel pemberdayaan karang taruna yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Data Total Skor Jawaban Responden Terhadap Variabel Pemberdayaan Karang Taruna ( X )

No. Responden	Item-item		Total Skor	Kategori
	X1	X2		
1	10	4	14	Tinggi
2	5	4	9	Tinggi
3	9	3	12	Tinggi
4	3	3	6	Rendah
5	3	2	5	Rendah
6	9	4	13	Tinggi
7	4	2	6	Rendah
8	9	3	12	Tinggi
9	5	1	7	Rendah
10	9	3	12	Tinggi
11	4	2	6	Rendah
12	9	3	12	Tinggi
13	4	3	7	Rendah
14	9	4	13	Tinggi
15	9	4	13	Tinggi
16	6	1	7	Rendah
17	6	4	10	Tinggi
18	10	3	13	Tinggi
19	4	0	4	Rendah
20	9	3	12	Tinggi
21	4	3	7	Rendah
22	9	4	13	Tinggi
23	3	4	7	Rendah
24	3	3	6	Rendah

---

Sumber: Data Primer diolah 2010

Berdasarkan total skor jawaban terhadap variabel pemberdayaan karang taruna sebagaimana tercantum pada tabel di atas, maka data total skor jawaban responden tersebut dapat dikelompokkan dalam tabel frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.4 Data Frekuensi Kategori Jawaban Responden Terhadap Variabel Pemberdayaan Karang Taruna

Total Skor	Kategori	Frekuensi	Prosentase (%)
0 - 7	Rendah	13	54,17
8 - 14	Tinggi	11	45,83
<b>Jumlah</b>		24	100

Sumber : Data primer tahun 2010 (diolah)

Berdasarkan tabel frekuensi diatas, dapat diketahui bahwa dari 24 responden yang telah diteliti ada 10 responden (41,7%) yang menjawab frekuensi pemberdayaan karang taruna tinggi dan 14 responden (58,3%) yang menjawab pemberdayaan karang taruna rendah.

#### 4.6.2 Variabel Terpengaruh (Y) Tingkat Kesejahteraan

Untuk mengukur indikator tingkat kesejahteraan digunakan item-item sebagai berikut:

- a). Kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup
- b). Meningkatnya wawasan, pengetahuan, dan kemampuan
- c). Meningkatnya kapasitas produk usaha
- d). Meningkatnya penghasilan (income)
- e). Timbul sikap aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan organisasi
- f). Kemampuan untuk mengelola (menajerial) organisasi dengan baik

Variabel pemberdayaan terdiri dari 1 indikator dan dari indikator tersebut mempunyai 6 item, maka untuk skor tertinggi adalah 6 dan skor terendah adalah 0 sehingga untuk interval kelasnya sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Jumlah Tertinggi} - \text{Jumlah Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$\text{Interval} = \frac{6 - 0}{2} = 3 \quad (\text{Hadi, 1989:212})$$

Dari hasil di atas maka diperoleh pengelompokan interval untuk mengetahui frekuensi profesionalisme pegawai sebagai berikut:

- a Untuk total skor 0 – 3 termasuk dalam kategori rendah  
 b Untuk total skor 4 – 6 termasuk dalam kategori tinggi

Tabel 4.5 : Data Skor responden terhadap Variabel Tingkat kesejahteraan (Y)

N	Item-item						Total Skor	Kategori
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6		
1	0	1	1	0	0	1	3	Rendah
2	0	1	1	0	1	1	4	Tinggi
3	0	1	0	1	1	1	4	Tinggi
4	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi
5	0	1	0	0	1	0	2	Rendah
6	0	0	1	1	1	1	4	Tinggi
7	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi
8	0	0	0	0	1	1	2	Rendah
9	0	0	0	0	0	1	1	Rendah
10	0	1	1	1	1	1	5	Tinggi
11	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi
12	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi
13	0	1	0	0	1	1	3	Rendah
14	0	1	1	1	1	1	5	Tinggi
15	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi
16	0	1	1	0	1	0	3	Rendah
17	0	1	1	0	1	1	4	Tinggi
18	0	1	0	0	1	0	2	Rendah
19	0	0	0	0	0	0	0	Rendah
20	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi
21	1	0	0	0	1	0	2	Rendah
22	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi
23	0	1	0	0	0	1	2	Rendah
24	0	1	0	1	0	1	3	Rendah

Sumber : Data primer tahun 2010 (diolah)

Berdasarkan total skor jawaban terhadap variabel Tingkat Kesejahteraan sebagaimana tercantum pada tabel di atas, maka data total skor jawaban responden tersebut dapat dikelompokkan dalam tabel frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.6 Data Frekuensi Kategori Jawaban Responden Terhadap Variabel Kesejahteraan (Y)

<b>Total Skor</b>	<b>Kategori</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Prosentase (%)</b>
0 - 3	Rendah	11	45,83
3 - 6	Tinggi	13	54,17
<b>Jumlah</b>		24	100

Sumber : Data primer tahun 2010 (diolah)

Berdasarkan tabel frekuensi diatas, dapat diketahui bahwa ada 15 responden (62,5%) yang menjawab frekuensi kesejahteraan tinggi, dan 9 responden (37,5%) yang menjawab kesejahteraan rendah.

#### 4.7 Variabel Pemberdayaan (X) dan Variabel Kesejahteraan (Y)

Kemudian untuk memudahkan dalam proses analisis data, dibuat tabel kategori yang menggabungkan kategori jawaban dari variabel X dan Y sebagai berikut :

Tabel 4.7 Kategori Jawaban responden Terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan

N	Kategori	
	X	Y
1	Tinggi	Rendah
2	Tinggi	Tinggi
3	Tinggi	Tinggi
4	Rendah	Tinggi
5	Rendah	Rendah
6	Tinggi	Tinggi
7	Rendah	Tinggi
8	Tinggi	Rendah
9	Rendah	Rendah
10	Tinggi	Tinggi
11	Rendah	Tinggi
12	Tinggi	Tinggi
13	Rendah	Rendah
14	Tinggi	Tinggi
15	Tinggi	Tinggi
16	Rendah	Rendah
17	Tinggi	Tinggi
18	Tinggi	Rendah
19	Rendah	Rendah
20	Tinggi	Tinggi
21	Rendah	Rendah
22	Tinggi	Tinggi
23	Rendah	Rendah
24	Rendah	Rendah

---

Sumber : Data primer tahun 2010 (diolah)

## **BAB 5**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Pengantar**

Analisis data merupakan langkah lebih lanjut dalam suatu penelitian. Analisis data diperlukan untuk dapat menyederhakan data ke dalam bentuk penyajian yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dimulai dengan mengolah data-data yang telah diperoleh yakni berupa jawaban responden terhadap kuesioner yang telah diajukan kepada responden.

Analisis data mempunyai makna penting dalam suatu proses penelitian karena ini akan berguna untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, apakah nantinya hipotesis yang telah diajukan dapat diterima atau ditolak.

#### **5.2 Penerapan Analisis Chi Square ( $X^2$ )**

Dalam penelitian ini diambil sebanyak 24 responden, dimana karena jumlah sample yang diambil 24 orang maka analisis Chi Square yang dipakai adalah analisis  $X^2$  dan sampel 20 – 40 orang, sehingga menurut Cochran (dalam Siegel, 1997:1370) adalah :

1. Bila  $N > 40$  gunakan  $X^2$  dengan koreksi kontinuitas.
2. Bila  $N$  ada diantara 20 – 40 tes  $X^2$  boleh dipakai jika semua frekuensi diharapkan adalah 5 atau lebih. Jika semua frekuensi yang diharapkan terkecil kurang dari 5 pakailah Tes Fisher.
3. Bila  $N < 20$  gunakan Tes Fisher untuk kasus apapun.

Selanjutnya Siegel (1997: 137) mengemukakan sebagai berikut :

1. Masukkan frekuensi-frekuensi observasi dalam suatu tabel kontingensi k x r, dengan menggunakan k kolom untuk kelompok dan r baris yang disediakan untuk kondisi-kondisi yang berlainan.
2. Tentukan frekuensi yang diharapkan untuk masing-masing sel itu dan membaginya dengan N (jumlah responden)
3. Menentukan derajat kebebasan (db) untuk menentukan taraf signifikansi dengan rumus  $db = (k - 1) (r - 1)$ .
4. Menentukan signifikansi  $X^2$  observasi dengan acuan tabel C, jika kemungkinan yang diberikan oleh tabel C sama dengan atau < dari  $X^2$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Sehingga rumus yang dipakai :

$$X^2 = \frac{N \left[ (AD - BC) - \frac{N}{2} \right]^2}{(A + B)(C + D)(A + C)(B + D)}$$

### 5.3. Menentukan Frekuensi Observasi Pada Tabel Kontingensi

Untuk mempermudah masukan frekuensi observasi pada tabel, maka perlu kiranya dilakukan perincian data dari kedua tabel data berdasarkan skor dari variabel X dan variabel Y seperti tersebut di bawah ini:

- a. Responden yang menjawab pemberdayaan rendah dan kesejahteraan rendah ada 8 orang responden.
- b. Responden yang menjawab pemberdayaan rendah dan kesejahteraan tinggi ada 3 orang responden.
- c. Responden yang menjawab pemberdayaan tinggi dan kesejahteraan rendah ada 3 orang responden.
- d. Responden yang menjawab pemberdayaan tinggi dan kesejahteraan tinggi ada 10 orang responden.

Selanjutnya yaitu dengan memasukkan frekuensi observasi ( $f_o$ ) ke dalam tabel kontingensi (2x2). Hal ini sesuai dengan kategori masing-masing variabel sehingga hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Tabel Kontingensi Observasi Variabel X Dan Variabel Y

Variabel X (Pemberdayaan)	Variabel Y (Kesejahteraan Karang Taruna)		Jumlah
	Tinggi	Rendah	
Tinggi	10 (A)	3 (B)	(A+B) 13
Rendah	3 (C)	8 (D)	(C+D) 11
Jumlah	13 (A+C)	11 (B+D)	24

Sumber : Data primer tahun 2010 (diolah)

#### 5.4 Menentukan Frekuensi yang diharapkan ( $f_h$ ) untuk masing-masing sel

Frekuensi harapan dari masing-masing sel dapat diperoleh dengan mengkalikan jumlah marginal kedua sisi yang berlawanan dari masing-masing sel dan membaginya dengan jumlah sampel keseluruhan. Merujuk dari ketentuan diatas dimana hasil perhitungan frekuensi harapan ( $f_h$ ) di dapat dengan menggunakan rumus :

$$F_h = \frac{\text{Jumlah Frekuensi Kolom} \times \text{Jumlah Frekuensi Baris}}{\text{Jumlah Sampel}}$$

( Siegel, 1997 : 130 )

Berdasarkan rumus diatas maka berikut ini akan dicari  $f_h$  dari masing-masing sel. Pengukuran frekuensi harapan ( $f_h$ ) sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Karang Taruna tinggi, Kesejahteraan Karang Taruna tinggi

$$f_h = \frac{13 \times 13}{24} = \frac{169}{24} = 7,04$$

- b. Pemberdayaan Karang Taruna tinggi, Kesejahteraan Karang Taruna rendah

$$f_h = \frac{13 \times 11}{24} = \frac{143}{24} = 5,96$$

- c. Pemberdayaan Karang Taruna rendah, Kesejahteraan Karang Taruna tinggi

$$f_h = \frac{11 \times 13}{24} = \frac{143}{24} = 5,96$$

- d. Pemberdayaan Karang Taruna rendah, Kesejahteraan Karang Taruna rendah

$$f_h = \frac{11 \times 11}{24} = \frac{121}{24} = 5,04$$

Ternyata  $f_h$  yang terkecil 5,04 atau lebih besar dari 5

### 5.5 Memasukkan Frekuensi Harapan Ke Dalam Tabel Persiapan

Rumus  $X^2$  hanya dapat dikerjakan bila frekuensi tiap-tiap sel diketahui. Untuk mempermudah perhitungan perlu dilakukan penyederhanaan dan memasukkan frekuensi observasi untuk tiap-tiap sel sudah diketahui. Tabel persiapan yang diperkenankan untuk teknik analisis  $X^2$  dari rumus diatas adalah tabel Kontingensi 2x2. Frekuensi-frekuensi observansi untuk tiap-tiap sel dapat dilihat pada tabel-tabel sebelumnya diatas.

Berdasarkan penghitungan  $f_h$  diatas kemudian dimasukkan kedalam tabel kontingensi sebagai berikut :

Tabel 5.2. Tabel Kontingensi Observasi Frekuensi Harapan

Variabel X (Pemberdayaan Karang Taruna)	Variabel Y (Kesejahteraan Karang Taruna)		Total Skor
	Tinggi	Rendah	
Tinggi	7,04	5,96	13
Rendah	5,96	5,04	11
Jumlah	13	11	24

Sumber : Data primer tahun 2010 (diolah)

### 5.5 Menentukan db Untuk Mencari Taraf Signifikansi

Menentukan db (derajat kebebasan) sangat penting untuk mempermudah dalam mencari taraf signifikansi  $X^2$  tabel (tabel C). Derajat kebebasan (db) berhubungan dengan jumlah frekuensi tiap-tiap sel. Untuk kasus satu sampel digunakan rumus  $db = k - 1$ , dimana k merupakan banyaknya kategori dalam klasifikasi. Sedangkan untuk kasus dua sampel atau lebih dipakai rumus :

$$Db = (r - 1) (k - 1)$$

Keterangan :

r = banyaknya baris

k = banyaknya kolom

Berdasarkan rumus diatas maka db untuk penelitian ini adalah :

$$db = (r - 1) (k - 1)$$

$$db = (2 - 1) (2 - 1)$$

$$db = (1) (1)$$

$$\mathbf{db = 1}$$

### 5.6 Menghitung Nilai Chi Square ( $X^2$ )

Berdasarkan tabel persiapan diatas, maka nilai  $X^2$  dapat dihitung sebagai berikut :

Diketahui :

$$N = 24$$

$$A = 10$$

$$B = 3$$

$$C = 3$$

$$D = 8$$

Ditanyakan :  $X^2$  .....?

Jawab :

$$X^2 = \frac{N \left[ (AD - BC) - \frac{N}{2} \right]^2}{(A + B)(C + D)(A + C)(B + D)}$$

$$X^2 = \frac{24 \left[ (10 \times 8) - (3 \times 3) - \frac{24}{2} \right]^2}{(10 + 3)(3 + 8)(10 + 3)(3 + 8)}$$

$$X^2 = \frac{24[(80) - (9) - 12]^2}{(13)(11)(13)(11)}$$

$$X^2 = \frac{24[71 - 12]^2}{20449}$$

$$X^2 = \frac{24[59]^2}{20449}$$

$$X^2 = \frac{83544}{20449} = 4,0854$$

$$X^2 = 4,1$$

Dari penghitungan diatas, diperoleh hasil  $X^2$  sebesar **4,1**

### 5.8 Menentukan Signifikansi $X^2$ Hitung Dengan Acuan Tabel C (Tabel Harga Kritis Chi Kuadrat)

Langkah terakhir dari analisis  $X^2$  adalah menentukan signifikansi, yaitu dengan cara membandingkan antara  $X^2$  tabel / observasi dengan nilai  $X^2$  tabel dengan nilai  $X^2$  tabel yang dalam harga kritik Chi Kuadrat. Tabel yang digunakan sebagai acuan adalah tabel C. Dalam penelitian ini digunakan taraf kepercayaan 95% sedang taraf ketidakpercayaan ( $\alpha$ ) yaitu 0,05 dan db = 1, diperoleh harga Chi Kuadrat ( $X^2$ ) sebesar 4,1. hal ini menunjukkan bahwa  $4,1 > 3,84$  ( $X^2$  hitung / observasi lebih besar daripada  $X^2$  tabel).

Berarti Hipotesis Alternatif ( $H_a$ ) diterima, dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara faktual ada pengaruh antara Pemberdayaan Karang Taruna terhadap Tingkat Kesejahteraan Anggota Karang Taruna. Mengacu pada hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Pemberdayaan Karang Taruna maka akan cenderung semakin tinggi Tingkat Kesejahteraan Anggota Karang Taruna.

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas serta berdasarkan pada hasil analisis dan interpretasi data, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aktifitas tingkat pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember terhadap Karang taruna Tunas Bangsa Kaliwining Kecamatan Rambipuji kabupaten Jember termasuk dalam kategori Tinggi.
2. Setelah dilakukan kajian dari hasil analisa terhadap beberapa item pertanyaan terkait dengan indikator tingkat kesejahteraan, diketahui bahwa tingkat kesejahteraan anggota Karang Taruna termasuk dalam kategori tinggi atau sejahtera.
3. Hasil analisis Chi Kuadrat ( $X^2$ ) tentang pengaruh pemberdayaan karang taruna terhadap tingkat kesejahteraan berdasarkan uji signifikasi diketahui bahwa dalam harga kritik Chi Kuadrat menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara kedua variabel diatas.